

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA
SITUS RESMI KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
(KNKL) DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

ANISA RAHMAWATI

NIM : 2013310607

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

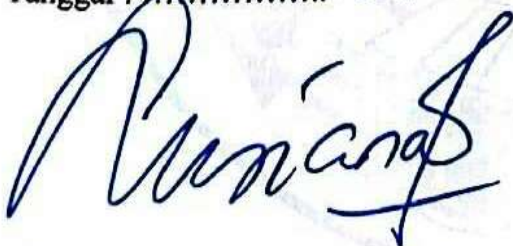
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Anisa Rahmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 18 Januari 1995
N.I.M : 2013310607
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Kosentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Penyajian Informasi Keuangan pada Situs Resmi Kementerian Negara/ Lembaga (KNKL) di Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 23 Februari 2017

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 14 Januari 2017



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.,
QIA., CPSAK)



(Pepie Diantyana, S.E., AK., M.Si.)

ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DI INDONESIA

Anisa Rahmawati
2013310607
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2013310607@students.perbanas.ac.id

Pepie Diptyana
STIE Perbanas Surabaya
Email : pepie@perbanas.ac.id
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the practice of Internet Financial Reporting (IFR) using an index that consists of content, timeliness, technology used, and user support on the official sites Indonesian states ministry or society (KNKL). This research is descriptive quantitative research with purposive sampling method. This study used a sample KNKL listed as auditee of BPK number 83 has been observed as much as three times the observations in the period October to December 2016. The results of this study indicate that public disclosure particularly the presentation of financial information on the official website KNKL in Indonesia still need to further improve. The results showed that the application of the IFR by KNKL in Indonesia is relatively low with an average gain of 46.06 percent IFR index. This is supported by the acquisition of the average index of the content of 38.13 percent, the timeliness of 48.04 percent, the technology used by 55.76 percent, and the user support at 50.26 percent.

Key words : *Internet Financial Reporting, Website, Information Technology, Content, Public Disclosure*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi pada saat ini semakin berkembang pesat hal ini karena semakin dibutuhkannya informasi yang cepat, tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat tetapi juga terjadi dibagian pemerintahan. Teknologi informasi saat ini bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan primer untuk menunjang pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

Mengingat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* yang menjelaskan bahwa Indonesia pada saat ini

sedang mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang sedang dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat

luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Instruksi Presiden tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang juga tercantum pada *website* resmi Komisi Informasi Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan bahwa setiap Badan Publik memiliki hak dan kewajiban dalam penyediaan informasi publik. Di bidang keuangan, secara eksplisit disebutkan pada pasal 7 dan 9 bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Media penyampaian informasi dapat tertulis maupun disajikan di media elektronik, yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh publik. Media penyampaian informasi dapat tertulis maupun disajikan di media elektronik, yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh publik. Demikian juga dengan Kementerian Negara/Lembaga juga memiliki hak dan kewajiban dalam penyediaan informasi publik karena merupakan salah satu Badan Publik. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 30, 31 dan 32 tentang Keuangan Negara juga menyatakan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBN/D) berupa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan data yang tercantum di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jumlah Kementerian Negara/ Lembaga (KNKL) pada tahun 2016 adalah 163

KNKL. Jumlah tersebut dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya, yakni Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 28 Lembaga, Lembaga Non Struktural sebanyak 88 Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Negara sebanyak 7 Lembaga, Lembaga Setingkat Menteri sebanyak 4 Lembaga, Kementerian Negara sebanyak 34 Kementerian, dan Lembaga Penyiaran Publik sebanyak 2 Lembaga. Sedangkan KNKL yang mendapat penilaian kinerja dan bertanggungjawab atas akuntabilitas publik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 86 KNKL.

Berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan peraturan-peraturan yang mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas informasi oleh badan publik, maka pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan biaya yang relatif lebih murah sangat diperlukan, hal ini dikarenakan agar terciptanya transparansi dengan biaya yang relatif lebih murah, mudah, dan dapat menghadirkan kemajuan bagi entitas ekonomi. Almilia (2008) mengungkapkan bahwa internet dapat digunakan dalam mengembangkan penyediaan informasi keuangan dalam hal ketepatanwaktuan penyediaan informasi bagi pengguna informasi keuangan. Dengan adanya media internet juga dapat menghilangkan keterbatasan karena perbedaan wilayah dan juga dapat meningkatkan frekuensi pelaporan informasi keuangan kepada publik mengingat kebutuhan akan penyediaan informasi dengan cepat. Menurut Mohamed, Oyelere, dan Al-Busaidi (2009) kemajuan teknologi telah membuat internet menjadi alat yang berguna, tepat waktu dan hemat biaya sebagai media komunikasi dan informasi kepada para pemangku kepentingan. Internet memiliki potensi kekuatan untuk merevolusi pelaporan keuangan.

Website pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/ Lembaga adalah salah satu sarana untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Penelitian tentang transparansi informasi melalui *website* atau lebih dikenal dengan istilah *Internet Financial Reporting* (IFR) dengan menggunakan indeks *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* sudah banyak dilakukan pada perusahaan bisnis. Selain itu indeks IFR tersebut telah dikembangkan oleh banyak peneliti untuk mengukur kualitas IFR, diantaranya oleh Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasanan (2014) yang mengukur IFR dengan konten dan *internet presentation*. Konten terdiri dari tiga kategori yang berbeda yaitu: 1) informasi keuangan, 2) informasi tata kelola perusahaan, dan 3) informasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Internet presentation* terdiri dari dua kategori yaitu: 1) teknologi, 2) kenyamanan dan ketepatan waktu. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 persen dari perusahaan sampel yang ada terletak pada batas efisiensi untuk semua komponen IFR.

Penelitian yang sejenis tentang pengungkapan IFR di Kementerian Negara/Lembaga telah dilakukan oleh Saraswati (2012) yang menggunakan data anggaran keuangan Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, kekayaan informasi, jumlah dokumen dan data index. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *website* kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia sudah diterapkan dengan baik serta ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara *website* Kementerian dengan *website* Lembaga Tinggi Negara pada popularitas.

Alam dan Rashid (2014) meneliti keadaan Pelaporan Keuangan melalui Internet (IFR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE), Pakistan. Indeks IFR dalam penelitian menggunakan empat dimensi: *content*, *timeliness*, *technology*, *user support*.

Penelitian ini memodifikasi dan menggunakan indeks IFR untuk mengukur pengungkapan sukarela dari perusahaan yang terdaftar di situs Web mereka di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan *Internal Consistency test*: koefisien *Cronbach* untuk skala IFR adalah 0.81 dan antar-item korelasi antara IFR dan komponen, yaitu, masing-masing *content*, *timeliness*, *technology*, *user support*, adalah 0,92, 0,87, 0,58, dan 0,78. Rata-rata skor IFR adalah 47,24 dengan standar deviasi yang menunjukkan bahwa variasi antara praktik IFR dari perusahaan yang terdaftar di KSE adalah 11,96. Pengungkapan berkisar dari minimal 22 untuk maksimum 69, menyiratkan bahwa ada perbedaan yang besar dalam pengungkapan IFR pada *website* perusahaan yang terdaftar di KSE, Pakistan.

Momany, Al-Malkawi, dan Mahdy (2014) meneliti tentang pelaporan keuangan di internet pada perusahaan yang beroperasi di Negara ekonomi berkembang, yaitu Yordania. Tahap pertama dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan situs web elektronik Global dan Yordania untuk mencari sebuah perusahaan memiliki situs web atau tidak. Kemudian berdasarkan hasil pencarian, perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) perusahaan yang memiliki situs web dan melaporkan informasi keuangan; (2) perusahaan yang memiliki situs web tetapi tidak melaporkan informasi keuangan; dan (3) perusahaan yang tidak memiliki situs web sama sekali. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki situs web dan melaporkan informasi keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan data pasar) diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: (1) perusahaan yang mengungkapkan seperangkat laporan keuangan; (2) perusahaan yang mengungkapkan secara parsial atau laporan keuangan ringkasan; dan (3) perusahaan yang mengungkapkan ikhtisar keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87 perusahaan

Yordania (69 persen) memiliki situs web dengan sekitar 51 persen (44 dari 87) meliputi laporan keuangan dan 32 dari 44 perusahaan (sekitar 73 persen) menyebarkan semua informasi keuangan mereka di situs web mereka.

Minioui dan Oyelere (2013) meneliti tentang praktik IFR yang terdaftar di UEA. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di *Dubai Financial Market* (DFM) dan *The Abu Dhabi Securities Exchange* (ADX). Dalam menilai publikasi informasi keuangan pada *website*, peneliti mengelompokkan ke dalam tiga kelompok yakni XBRL, PDF, dan HTML. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83 persen perusahaan terlibat dalam IFR dan 63 persen perusahaan tidak terlibat dalam IFR, dengan akurasi keseluruhan 76 persen.

Malhotra dan Makkar (2012) meneliti tentang penggunaan *web reporting* di India, dengan membandingkan antar sektor dalam praktek *web reporting* dan menganalisis penggunaan *web reporting* pada perusahaan yang beroperasi di India. Berbagai item pengungkapan dipertimbangkan untuk tujuan membuat analisis komparatif dari sektor antar-perusahaan. Item pengungkapan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: (1) atribut umum; dan (2) atribut keuangan. Data dikumpulkan ke dalam 35 item pengungkapan: 22 item umum dan 13 item keuangan pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan India sudah mulai menggunakan internet sebagai media untuk pelaporan. Meskipun persentase perusahaan memberikan informasi untuk investor tidak terlalu tinggi, ada kemungkinan kecenderungan meningkat pada sektor korporasi India. Persentase pelaporan melalui internet pada perusahaan India rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Berdasarkan fenomena pada tahun 2014, yakni pada pemeriksaan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) 2014 terungkap 480 permasalahan terkait dengan kerugian negara senilai Rp 488,22 miliar pada 82 entitas. Oleh karena itu, dengan adanya keterbukaan informasi akan memudahkan publik untuk memonitor dan mengevaluasi tentang kinerja Kementerian Negara/Lembaga salah satunya melalui anggaran yang digunakan. Hal ini tidak lain karena Kementerian Negara/Lembaga merupakan Badan Publik, dimana anggaran yang digunakan juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah membandingkan penyajian informasi keuangan antara Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini dikarenakan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang *Internet Financial Reporting* (IFR) banyak menggunakan objek penelitian perusahaan ataupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin menguji menggunakan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini mengacu pada Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasanan (2014) dengan menggunakan indeks IFR yaitu konten, *timeliness*, teknologi yang digunakan, dan *user support* dan menghilangkan indeks yang tidak berhubungan dengan Pemerintahan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam pengukuran IFR di berbagai sektor seperti di KNKL, Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan *profit-oriented*.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Teori Signaling

Teori signaling dapat digunakan untuk memberikan informasi dari suatu perusahaan (pemerintah) yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Suwardjono, (2013:583) menjelaskan teori signaling menunjukkan bagaimana

seharusnya sebuah perusahaan (pemerintah) memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan (pemerintah) untuk merealisasikan keinginan pengguna laporan keuangan tersebut. Sinyal yang diberikan dapat berupa kelengkapan pengungkapan informasi keuangan atau ketepatan waktu informasi lain yang menyatakan bahwa pemerintah telah menerapkan transparansi informasi. Leland dan Pyle, (1977) dalam Scott, (2012:475) menjelaskan teori sinyal atau *signaling theory* adalah salah satu teori yang digunakan untuk menggambarkan adanya suatu dorongan atau sinyal dari pihak manajer (eksekutif) pada suatu perusahaan (pemerintahan) yang memiliki informasi mengenai kinerja perusahaan (pemerintahan) melalui laporan keuangan, agar dapat meningkatkan nilai perusahaan (pemerintah) dan secara tidak langsung perusahaan telah memberi sinyal baik pada publik.

Teori signaling merupakan teori yang dapat membantu pihak pemerintah (*agent*) dan prinsipal (publik/masyarakat) untuk mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan transparansi, kualitas dan integritas informasi. Contohnya informasi terkait informasi keuangan. Apabila pemerintah tidak cukup memberikan informasi kepada publik mengenai laporan keuangan, pemerintah seolah-olah tidak transparan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga hal ini membuat publik berfikir negatif bahwa telah terjadi tindak kecurangan.

Teori signaling mendukung pemerintah untuk dapat memberikan sinyal yang positif kepada rakyat (Evans dan Patton; 1987). Hal ini bertujuan agar rakyat dapat mendukung jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Adanya transparansi informasi keuangan merupakan salah satu sarana untuk memberikan sinyal positif

kepada rakyat untuk mendukung jalannya pemerintahan.

Sistem informasi dijelaskan oleh Ardana dan Lukman (2016: 11) dimana informasi bertujuan untuk menghasilkan *output* yang berkualitas. Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2012 menjelaskan bahwa informasi harus berguna bagi para pemakai laporan keuangan, sehingga ada empat karakteristik kualitatif pokok yang menjadi patokan untuk menilai kualitas informasi, diantaranya adalah:

- a. Dapat dimengerti, apabila informasi tersebut disajikan dalam format yang bermanfaat dan memenuhi persyaratan bagi penggunaannya.
- b. Relevan, apabila informasi tersebut akan mengurangi ketidakpastian, mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, untuk membuat prediksi.
- c. *Materiality*, apabila salah saji laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan.
- d. *Comparability* apabila informasi dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan informasi tersebut dan informasi laporan lainnya.

Kementerian Negara/ Lembaga (KNKL)

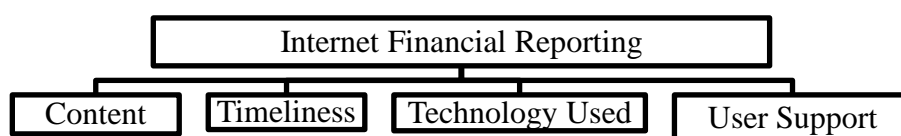
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan entitas akuntansinya, Kementerian bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 disebutkan juga

bahwa hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen dijelaskan bahwa lembaga negara Indonesia merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan berdasarkan pembentuknya, diantaranya yang pertama adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kewenangannya diatur dalam UUD, dan dirinci dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi. Lembaga tingkatan kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan sebagainya. Lembaga

tingkatan ketiga adalah lembaga yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah UU. Artinya, keberadaannya secara hukum murni dari kebijakan Presiden (*presidential policy*) atau *bleid* Presiden. Contoh dari lembaga-lembaga ini diantaranya adalah Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Lembaga Ketahanan Nasional. Tingkatan yang lebih rendah lagi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Pembentukan ini atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan data yang tercantum di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jumlah Kementerian Negara/ Lembaga (KNKL) pada tahun 2016 adalah 163 KNKL. Jumlah tersebut dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya, yakni Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 28 Lembaga, Lembaga Non Struktural sebanyak 88 Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Negara sebanyak 7 Lembaga, Lembaga Setingkat Menteri sebanyak 4 Lembaga, Kementerian Negara sebanyak 34 Kementerian, dan Lembaga Penyiaran Publik sebanyak 2 Lembaga. Sedangkan KNKL yang mendapat penilaian kinerja dan bertanggungjawab atas akuntabilitas publik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 86 KNKL.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Jadi, populasi tidak hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi mencakup seluruh sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, sampel yang diambil dapat mewakili populasi tersebut.

Populasi penelitian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (KNKL) di Indonesia yang terdaftar sebagai *auditee* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), artinya adalah KNKL yang bertanggungjawab untuk menerbitkan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja kepada publik sesuai perundang-undangan yang berlaku pada masa penelitian serta yang menjadi dasar BPK dalam melakukan pemeriksaan (Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Hal ini menunjukkan bahwa KNKL yang terdaftar sebagai *auditee* BPK adalah KNKL yang bertanggungjawab untuk menerbitkan laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah KNKL yang memiliki otonomi anggaran dan bertanggungjawab atas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. KNKL yang terdaftar sebagai *auditee* BPK dan yang mendapat penilaian kinerja serta bertanggungjawab atas akuntabilitas publik.
2. KNKL yang memiliki situs resmi dan dapat diakses.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang didapat dari situs resmi Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia yang kemudian dihimpun menggunakan *checklist* penilaian. Metode Pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi yakni dengan cara menelusuri situs resmi Kementerian Negara/Lembaga (KNKL) di Indonesia. Data Kementerian Negara/Lembaga (KNKL) diperoleh dari situs resmi data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2015 dan situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yakni IFR. Hal ini karena pada penelitian ini akan membandingkan *Internet Financial Reporting* antar Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia. Untuk membandingkannya terdapat indeks-indeks yang harus diteliti, diantaranya adalah :

- a. *Content*
- b. *Timeliness*
- c. *Technology used*
- d. *User support*

Penelitian ini juga menggunakan komposisi pembobotan indeks yang dikembangkan oleh Cheng *et. al.* (2000) dalam Almilia (2009) empat komponen masing-masing diberi bobot sebagai berikut, Isi/*content* sebesar 40%, ketepatanwaktuan/*timeliness* sebesar 20%, Pemanfaat teknologi (20%) dan dukungan pengguna/*user support* sebesar (20%).

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yakni IFR. Pengukuran variabel IFR dalam penelitian ini menggunakan indeks dan skor. Skor dalam masing-masing indeks diperoleh dari penilaian menggunakan *checklist*. Total skor maksimum adalah 100 persen untuk masing-masing indeks. Berikut adalah rumus dalam mengukur indeks IFR:

$$\text{Indeks IFR} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Content

Konten merupakan komponen informasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dibagi menjadi dua jenis informasi diantaranya konten informasi tahun terakhir dan konten informasi tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian kategori dari indeks *content*:

Konten Informasi Tahun Terakhir (Tahun 2015)

Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK, *Segmented Reporting* (triwulan, atau semesteran), Pernyataan Strategi, Visi dan Misi (Rencana Strategis), Skor Konten, 1= Ada, 0= Tidak ada, dengan bobot : PDF = 0,75, HTML = 1

Konten Informasi Tahun Sebelumnya

Konten informasi tahun sebelumnya berisi Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK, *Segmented Reporting* (triwulan, atau semesteran). Dengan penilaiannya skor Konten, 1= Ada, 0= Tidak ada, dengan bobot : 0,25 untuk 2 tahun tidak berurutan, bobot 0,5 untuk 3 tahun tidak berurutan, 0,75 untuk yang hanya 2 tahun berturut-turut, serta bobot maksimum 1 untuk lengkap berurutan lebih dari 3 tahun.

Skor Konten = nilai (ada atau tidak) x bobot. Skor maksimum untuk *content* adalah 17 poin.

Timeliness

Timeliness merupakan ketepatan waktu bagi KNKL dalam menyampaikan informasi kepada publik. Informasi yang disampaikan kepada publik ini yang dimaksud adalah mengenai berita yang dipublikasikan KNKL pada masing-masing situs resminya. Tolok ukur ketepatan waktu tersebut diantaranya mengenai: *Press release* (berita-berita), Lamanya *update* berita, Proses Anggaran Tahun Berjalan (RKA Tahun Berjalan), Proses Anggaran Tahun Berjalan (DPA Tahun Berjalan), Informasi Serapan Anggaran Tahun Berjalan. Berikut ini adalah penilaian skor *timeliness*:

Tabel 1
Penilaian Skor *Timeliness*

INDIKATOR	PENILAIAN		
	Ada	Tidak	(pilih salah satu)
Press release (berita-berita)			
Lamanya update berita	<input type="checkbox"/> pada hari pengamatan (bobot 3)		
	<input type="checkbox"/> ≤ 1 minggu sejak tanggal pengamatan (bobot 2)		
	<input type="checkbox"/> > 1 minggu sejak tanggal pengamatan (bobot 1)		

Proses Anggaran Tahun Berjalan (RKA Tahun Berjalan)	Ada	Tidak		
Proses Anggaran Tahun Berjalan (DPA Tahun Berjalan)	Ada	Tidak		
Informasi Serapan Anggaran Tahun Berjalan	Ada	Tidak	pdf (1)	html (2)

Berdasarkan tabel skor indikator *timeliness* di atas, skor akhir *timeliness* = nilai (ada atau tidak) x bobot. Dengan skor maksimum untuk *timeliness* adalah 8 poin.

Technology Used

Technology used merupakan teknologi penunjang yang disajikan di dalam situs resmi Kementerian Negara/Lembaga. Indikator-indikator dalam *technology used* diantaranya sebagai berikut : *Download plugin on spot* dan *Online feedback* dengan bobot penilain 0,5, *Presentation slides* dengan bobot penilain 1, Multimedia dengan bobot penilain 2, *Analysis tools* dengan bobot penilain 2, *XBRL (advanced features)* dengan bobot penilain 3. Penilaian untuk masing-masing indikator tersebut, 1 = Ada, 0 = Tidak Ada. Skor masing-masing kategori *technology used* = nilai (ada atau tidak) x bobot. Skor maksimum untuk *technology used* adalah 9 poin

User support

User support merupakan *link* pendukung yang terdapat di dalam *website* resmi Kementerian Negara/Lembaga yang memudahkan para pengunjung *website* tersebut dalam berselancar. Dengan memperhatikan indikator-indikator berikut ini: *Help and FAQ*, *Link to Homepage*, *Site Map/ Peta Situs*, *Site Search* dengan masing-masing bobot penilaian 0,5; Jumlah klik untuk mengakses informasi keuangan (LKKL) dengan bobot penilaian maksimum jumlah klik untuk mengakses LKKL adalah 1 poin dengan kriteria apabila dalam mengakses LKKL tersebut hanya memerlukan klik sebanyak 1 kali, apabila memerlukan 2 kali klik maka akan

mendapat bobot nilai 0,5 poin, serta apabila dalam mengakses LKKL memerlukan lebih dari 2 kali klik maka akan mendapat bobot nilai 0,25 poin; Konsistensi Desain Web, konsistensi desain web diukur dengan mengamati perubahan jumlah klik dalam mengakses LKKL. Desain web dikatakan konsisten apabila tidak ada perubahan jumlah klik ketika mengakses LKKL selama masa pengamatan, kriteria ini mendapat skor maksimum yaitu 1 poin. Dikatakan agak konsisten apabila perubahan jumlah klik ketika mengakses LKKL selama masa pengamatan terjadi 1 sampai dengan 2 kali dengan mendapat bobot penilaian 0,75 poin, serta dikatakan tidak konsisten apabila perubahan jumlah klik lebih dari 2 kali selama masa pengamatan dengan bobot penilaian 0,5 poin; Ketersediaan Menu Transparansi Keuangan, diukur dengan mengamati tata letak menu di situs resmi KNKL. Apabila menu transparansi keuangan terdapat di *home website*, maka akan mendapat skor maksimum yaitu 2 poin. Apabila menu transparansi keuangan terdapat di *home PPID*, maka akan mendapat bobot penilaian 1,5 poin, serta apabila menu transparansi keuangan tersebut terdapat selain di *home PPID* dan *home website*, maka bobot penilaian 1 poin; Informasi Prosedur Layanan Permohonan Informasi, diukur dengan mengamati format penyajian informasi prosedur layanan permohonan informasi di situs resmi KNKL. Apabila format penyajian informasi prosedur layanan permohonan informasi dalam bentuk HTML, maka akan mendapat skor maksimum yaitu 1 poin dan apabila format penyajian informasi prosedur layanan

permohonan informasi dalam bentuk PDF, maka akan mendapat bobot penilaian 0,5 poin; Ketersediaan Fasilitas Layanan Permohonan Informasi (Formulir), diukur dengan mengamati jenis ketersediaan formulir permohonan informasi di situs resmi KNKL. Apabila jenis formulir permohonan informasi dalam bentuk elektronik (*e-form*), maka akan mendapat skor maksimum yaitu 1 poin dan apabila jenis formulir permohonan informasi dalam bentuk manual, maka akan mendapat bobot penilaian 0,5 poin. Skor maksimum untuk *user support* adalah 8 poin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skor maksimum *Internet Financial Reporting* (IFR) adalah sebesar 42 poin.

Alat Analisis

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. *Ranking* perolehan indeks IFR
Skor IFR untuk menentukan ranking yang diperoleh masing-masing KNKL. Setiap KNKL akan dihitung perolehan skornya berdasarkan indikator-indikator IFR yang termuat di *check list*. Total skor IFR yang diperoleh oleh setiap KNKL akan dapat menentukan urutan ranking yang diperoleh oleh setiap KNKL.
- b. *Mean* (rata-rata) dan median
Mean (rata-rata) pada penelitian ini untuk untuk menentukan indeks IFR rata-rata, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata yang diperoleh KNKL di Indonesia.
- c. Modus

Modus pada penelitian ini untuk menunjukkan nilai indeks IFR yang paling banyak diperoleh KNKL di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) menggunakan indeks IFR yang terdiri dari *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* pada situs resmi Kementerian Negara/Lembaga (KNKL) di Indonesia, sehingga penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan variabel penelitian.

Ranking Perolehan Indeks IFR

Ranking digunakan untuk menilai perolehan skor KNKL. Semakin tinggi perolehan skor yang didapat oleh KNKL, maka ranking yang akan diperoleh juga semakin baik. Pada penelitian ini *ranking* sepuluh teratas didominasi oleh Kementerian Negara, yaitu sebesar 60 persen atau sebanyak 6 Kementerian menduduki ranking sepuluh teratas, diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan 40 persen dari ranking sepuluh teratas diperoleh Lembaga, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Peringkat tertinggi indeks IFR diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan perolehan indeks IFR sebesar 82,74 persen, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan kepada publik melalui situs resmi oleh KPK sudah

sangat baik. Hasil ini konsisten dengan teori signaling yaitu situs resmi KNKL yang memiliki kualitas IFR yang bagus akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan lebih lengkap dan akan mempermudah publik dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini akan memberikan sinyal positif terhadap publik (rakyat) untuk terus mendukung jalannya pemerintahan.

Mean (rata-rata) dan Median

Penelitian ini menggunakan *mean* (rata-rata) untuk menentukan indeks IFR rata-rata, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata yang diperoleh KNKL di Indonesia. Ringkasan mengenai rata-rata indeks IFR KNKL beserta statistik deskriptifnya tersaji pada tabel 2 di bawah ini:

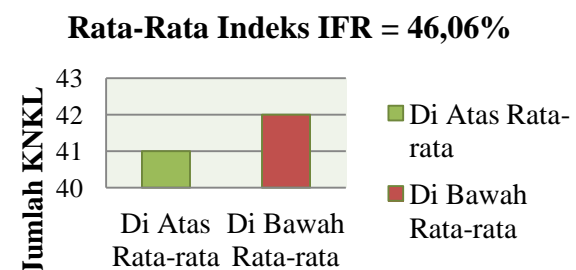
Tabel 2
DESCRIPTIVE STATISTIC KNKL

Statistics		
SKOR IFR		
N	Valid	83
	Missing	0
Mean		46,0628%
Median		44,6429%
Mode		27,98% ^a
Std. Deviation		18,33724%
Minimum		9,52%
Maximum		82,74%
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown		

Sumber: Data sekunder diolah dengan program SPSS versi 22

Tabel 2 menunjukkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 83 KNKL. Rata-rata indeks IFR seluruh sampel adalah 46,06 persen, dengan indeks IFR terendah (*minimum*) sebesar 9,52 persen diperoleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan indeks IFR tertinggi (*maximum*) sebesar 82,74 persen

diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi, rentang perolehan indeks IFR terendah dan tertinggi pada KNKL menyiratkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam pengungkapan IFR pada situs resmi KNKL di Indonesia. Nilai tengah indeks IFR adalah 44,64 persen, serta standar deviasi yang menunjukkan variasi antara praktik IFR dari KNKL di Indonesia adalah 18,33 persen. Nilai rata-rata indeks IFR lebih kecil dari nilai standard deviasi, hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian ini bersifat homogen. Berikut ini adalah ilustrasi tentang komposisi indeks IFR KNKL yang berada di atas rata-rata dan di bawah rata-rata yang tersaji dalam gambar 2:



Gambar 2
KOMPOSISI RATA-RATA INDEKS IFR KNKL

Gambar 2 menunjukkan bahwa 51 persen dari total sampel yang ada atau setara dengan 42 KNKL memiliki Indeks IFR di bawah rata-rata. Sedangkan KNKL yang memiliki Indeks IFR di atas rata-rata sejumlah 41 KNKL atau setara dengan 49 persen dari total sampel yang ada.

Modus

Penelitian ini menggunakan modus untuk menunjukkan nilai indeks IFR yang paling banyak diperoleh KNKL di Indonesia. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa indeks IFR yang sering muncul pada KNKL di Indonesia pada penelitian ini adalah 27,98 persen, dengan jumlah KNKL yang memiliki nilai indeks tersebut sebanyak 5 KNKL atau setara dengan 6,02 persen dari total sampel yang ada. KNKL yang memiliki nilai indeks IFR 27,98 persen tersebut diantaranya

adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Narkotika Nasional; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan Informasi Geospasial; dan Badan Kepegawaian Negara. Indeks IFR yang sering muncul sebesar 27,98 persen atau berada di bawah angka lima puluh persen dari indeks IFR maksimum seratus persen, hal ini mengindikasikan bahwa praktik penerapan IFR pada situs resmi KNKL di Indonesia masih tergolong rendah.

Berikut ini pembahasan yang lebih mendalam mengenai analisis deskriptif pada *Internet Financial Reporting* pada situs resmi KNKL:

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik khususnya informasi keuangan melalui situs resmi KNKL di Indonesia

masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan rata-rata indeks IFR yang diperoleh KNKL sebesar 46,06 persen atau berada di bawah angka lima puluh persen dari nilai indeks IFR maksimum seratus persen. Rata-rata indeks IFR ini diperoleh dari penjumlahan skor *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* dibagi dengan skor maksimum keseluruhan komponen IFR dan kemudian dirata-rata. Sedangkan rata-rata indeks *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* diperoleh dari perhitungan perbandingan antara skor perolehan masing-masing *indeks content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* pada setiap KNKL dibagi dengan jumlah sampel yang ada dan kemudian di rata-rata keseluruhan sampel yang ada.

Tabel 3
RATA-RATA INDEKS IFR KNKL

Indeks IFR	N	Rata-Rata Indeks IFR
CONTENT	83	38,13%
TIMELINESS	83	48,04 %
TECHNOLOGY USED	83	55,76%
USER SUPPORT	83	50,26%
IFR	83	46,06%
Valid N (listwise)	83	

Sumber: data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata indeks *content* sebesar 38,13 persen, 38,13 persen dihitung dari perbandingan antara perolehan skor *content* dibagi dengan skor maksimum *content*. Nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat transparansi laporan keuangan pada situs KNKL perlu untuk ditingkatkan, mengingat *content* merupakan indeks yang menyajikan unsur-unsur dari laporan keuangan yang berguna sebagai alat untuk memantau jalannya pemerintahan oleh publik.

Timeliness memiliki rata-rata sebesar 48,04 persen, 48,04 persen dihitung dari perbandingan antara perolehan skor

timeliness dibagi dengan skor maksimum *timeliness*. Nilai indeks tersebut berada di bawah 50 persen dari nilai maksimum yang mengindikasikan bahwa ketepatan penyampaian informasi melalui *press realease*, penyampaian RKA, DPA, dan informasi serapan anggaran tahun berjalan masih perlu untuk ditingkatkan.

Indeks *technology used* memiliki rata-rata sebesar sebesar 55,76 persen, 55,76 persen dihitung dari perbandingan antara perolehan skor *technology used* dibagi dengan skor maksimum *technology used*. Nilai indeks tersebut berada di atas 50 persen dari nilai maksimum serta menempatkan indeks ini sebagai rata-rata

indeks tertinggi di antara tiga indeks yang lain yaitu *content*, *timeliness*, dan *user support*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam mendesain situs resmi oleh KNKL di Indonesia sudah cukup tinggi, diantaranya 91,57 persen KNKL telah menggunakan teknologi *download plug-in spot*. Penggunaan teknologi *online feedback* dan *presentation slide* mencapai 98,80 persen, teknologi multimedia mencapai 96,39 persen, *analysis tools* sebesar 53,01 persen, serta terdapat KNKL yang telah menggunakan teknologi XBRL di situs resminya yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indeks *user support* memiliki rata-rata indeks sebesar 50,26 persen, 50,26 persen dihitung dari perbandingan antara perolehan skor *user support* dibagi dengan skor maksimum *user support*. Nilai indeks tersebut berada di atas 50 persen dari nilai maksimum serta menempatkan indeks ini sebagai rata-rata indeks tertinggi kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas dukungan pengguna pada situs resmi KNKL di Indonesia juga sudah cukup tinggi, diantaranya telah menyediakan fasilitas *help and FAQ* untuk pengunjung situs resmi (91,57 persen), *link to home page* (100 persen), sebesar 45,78 persen KNKL telah menyediakan fasilitas peta situs untuk memudahkan para pengunjung dalam mendapatkan informasi, serta seluruh (seratus persen) KNKL telah menyediakan fasilitas *site search* di situs resminya. Hal ini sesuai dengan teori signaling bahwa situs resmi KNKL yang memiliki nilai IFR yang bagus akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan lebih lengkap dan akan mempermudah publik dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini akan memberikan sinyal positif terhadap publik (rakyat) untuk terus mendukung jalannya pemerintahan.

Konsistensi desain web yang tidak berubah (63,86 persen) dalam masa

pengamatan juga mengindikasikan bahwa KNKL cenderung ingin memberikan kenyamanan pengunjung situs yang memiliki frekuensi kunjungan lebih dari satu kali. Ketersediaan menu transparansi keuangan di bagian selain *home PPID* dan *home website* (32,53 persen) menjadi favorit KNKL di Indonesia. Bagian tersebut diantaranya seperti di menu layanan publik, informasi publik, profil, dan sebagainya. Dukungan pengguna pada situs resmi KNKL ini juga dilengkapi dengan adanya informasi prosedur layanan permohonan informasi dalam format HTML (54,22 persen) dan PDF (13,25 persen), serta adanya ketersediaan formulir layanan permohonan informasi secara elektronik (24,10 persen) dan formulir manual (42,17 persen).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik *Internet Financial Reporting (IFR)* menggunakan indeks IFR yang terdiri dari *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* pada situs resmi Kementerian Negara/Lembaga (KNKL) di Indonesia. Dari hasil *sampling*, yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel terdapat 83 KNKL dari total keseluruhan KNKL yang terdaftar sebagai *auditee* BPK sebanyak 86 KNKL. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi publik khususnya penyajian informasi keuangan pada situs resmi KNKL di Indonesia masih perlu dilakukan peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFR oleh KNKL di Indonesia relatif rendah dengan rata-rata perolehan indeks IFR sebesar 46,06 persen. Hal ini didukung dengan perolehan rata-rata indeks *content* sebesar 38,13 persen, indeks *timeliness* sebesar 48,04 persen, indeks

- technology used* sebesar 55,76 persen, dan *user support* sebesar 50,26 persen
2. Tingkat transparansi laporan keuangan pada situs resmi KNKL masih tergolong rendah, hal ini disebabkan indeks rata-rata *content* jauh dibawah 50 persen, yakni hanya sebesar 38,13 persen, mengingat *content* merupakan indeks yang menyajikan unsur-unsur dari laporan keuangan yang berguna sebagai alat untuk memantau jalannya pemerintahan oleh publik.
 3. Indeks rata-rata *technology used* memiliki nilai paling tinggi diantara indeks yang lainnya yaitu sebesar 55,76 persen, hal ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi di situs resmi KNKL di Indonesia lebih unggul dan baik dibandingkan 3 indeks IFR yang lain.
 4. Kementerian Negara mendominasi perolehan *top 10* ranking indeks-indeks IFR, sedangkan perolehan ranking tertinggi indeks-indeks IFR di dominasi oleh Lembaga Negara.
 5. Ketepatanwaktuan, penggunaan teknologi, dan dukungan pengguna pada situs resmi KNKL sudah mencapai tingkat transparansi yang baik dengan perolehan skor di atas 50 persen.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa situs resmi KNKL yang tidak dapat diakses dan adanya KNKL yang memiliki situs resmi gabungan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sampel penelitian.
2. Terdapat banyak *link* mengenai laporan keuangan di situs resmi KNKL yang tidak dapat diakses (kosong), sehingga memerlukan waktu penelitian yang relatif lebih lama untuk melakukan pengecekan pada situs resmi KNKL yang lain.
3. Tidak adanya *standard* tertentu mengenai komposisi dan tata letak informasi pada situs resmi KNKL, sehingga menyulitkan dan

memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperoleh informasi dengan cepat dari masing-masing KNKL.

Adapun dari keterbatasan di atas, peneliti ingin memberikan saran untuk penelitian selanjutnya maupun untuk Pemerintah, diataranya sebagai berikut:

1. Fitur-fitur atau fasilitas layanan yang ada di situs resmi pemerintahan khususnya KNKL sebaiknya lebih menarik dan mudah diakses oleh para pengguna situs resmi, oleh karena itu sebaiknya perlu adanya peningkatan penyajian informasi keuangan pada situs resmi KNKL konten, ketepatanwaktuan, serta fasilitas dukungan pengguna di situs resmi KNKL.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami penerapan praktik IFR pada satu KNKL tertentu atau dengan membandingkan praktik IFR di Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, B. P. (2012). Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Nonkeuangan Melalui Website Perbankan di Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Alam, Z., & Rashid, K. (2014). Corporate financial reporting on the Internet: A survey of websites of listed companies in Pakistan. *IUP Journal of Corporate Governance*, 13(3), 17.
- Almilia, L. S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "Internet Financial and Sustainability Reporting". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12 (2), 117-131.
- Almilia, L. S. (2009). Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia. *Seminar*

- Nasional Aplikasi Teknologi Informasi* .
- Almilia, L. S. (2009). Analisa Kualitas Isi Financial And Sustainability Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*.
- Ardana dan Lukman.(2016).Sistem Informasi Akuntansi.Jakarta: Mitra Wacana Media
- Botti, L., Boubaker, S., Hamrouni, A., & Solonandrasana, B. (2014). Corporate Governance Efficiency and Internet Financial Reporting Quality. *Review of Accounting and Finance*, 13 (1), 43-64.
- Evans, J., Patton, J., 1987. Signaling and monitoring in public sector accounting. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130–158.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Malhotra, P., & Makkar, R. (2012). A Study of Corporate Web Reporting Practices in India. *IUP Journal of Corporate Governance*, 11(1), 7.
- Miniaoui, H., & Oyelere, P. (2013). Determinants of internet financial reporting practices: Evidence from the UAE. *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 16(04), 1350026.
- Prasetya, M., & Irwandi, S. A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 151-158.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik PEMDA terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi 15*, (hal. 1-26). Banjarmasin.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1).
- Saraswati, D. (2012). Evaluasi Keterbukaan Informasi Keuangan pada Website Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara Indonesia. *Penulisan Ilmiah Universitas Gunadarma*, 1-14.
- Scott, William R., 2012. *Financial Accounting Theory*. Sixth Edition. Toronto, Ontario: Pearson Canada Inc.
- Siregar, S. (2012: 108). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S. (2012: 121). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepriyanto, G., & Aristiani, R. (2011). Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet : Studi pada Pemerintahan Daerah di Indonesia . *Binus Bussines Review*, 2 (1), 192-201.
- Suwardjono (2013). Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi enam. Yogyakarta:BPFE
- T. Momany, M., N. Al-Malkawi, H. A., & A. Mahdy, E. (2014). Internet financial reporting in an emerging economy: evidence from Jordan. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 4(2), 158-174.
- Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
Umar, H. (1998). Sumber Daya Manusia
Dalam Organisasi. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
<http://www.komisiinformasi.go.id>
<http://www.menpan.go.id>

